PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENSTRA 2025-2029 DINAS PMPTSP

2025

pmptspselayar@gmail.com

https://dpmptsp.kepulauanselayarkab.go.id/

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunianya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025–2029 dapat di susun.

Penyusunan Rensta merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini pula di susun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tersusunnya Perubahan Renstra tahun 2025 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan secara maksimal meskipun masih terdapat kekurangan. Saran bersifat membangun dapat menunjang kesempurnaan Renstra ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas PMPTSP mendukung pencapaian visi, misi dan program yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 yakni dengan visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025–2029 adalah **"BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU DAN SEJAHTERA".**

Benteng, 25 September 2025

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 7

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PMPTSP
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PMPTSP..... 9
2.1.1 Pemasalahan dan Isu Strategis Dinas PMPTSP 9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP 14
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas PMPTSP 19
2.1.5 Mitra Dinas PMPTSP dalam Memberikan Pelayanan 21
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMPTSP 21
2.1.7 Pemasalahan dan Isu Strategis Dinas PMPTSP 21
2.2. Pemasalahan dan Isu Strategis Dinas PMPTSP 22
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP 22
2.2.1 Isu Strategis 24

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
3.1. TUJUAN JANGKAH MENENGAH DINAS PMPTSP..... 27
3.2. SASARAN JANGKAH MENENGAH DINAS PMPTSP..... 28

BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
4.1. PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 36
4.2. Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan Beserta Kinerja, dan Pagu Indikatif 54
4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 65
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMPTSP..... 67
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 69

BAB V : PENUTUP..... 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas PMPTSP 11

Tabel 2.2. Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat Dinas PMPTSP 11

Tabel 2.3. Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang Dinas PMPTSP 11

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Dinas PMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Juni 2025 12

Tabel 2.5. Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat) Juni 2025..... 12

Tabel 2.6. Data Aset dan Kondisinya Juni 2025 12

Tabel 2.7. Capaian Pelayanan Kinerja IKK Dinas PMPTSP 2020-2022 15

Tabel 2.8. Capaian Pelayanan Kinerja IKK Dinas PMPTSP 2023-2024 16

Tabel 2.9. Capaian Pelayanan Kinerja IKK Dinas PMPTSP 2020-2022 17

Tabel 2.10. Capaian Pelayanan Kinerja IKK Dinas PMPTSP 2023-2024 18

Tabel 2.11. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMPTSP 23

Tabel 2.12 Isu Strategis Dinas PMPTSP 24

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas PMPTSP 30

Tabel 3.2. Tahapan Renstra Dinas PMPTSP 31

Tabel 3.3. Arah kebijakan Renstra Dinas PMPTSP 33

Tabel 3.4. Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi Dinas PMPTSP 34

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas PMPTSP 43

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 55

Tabel 4.3 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas 66

Tabel 4.4 Proyeksi Indikator Kinerja Perangkat Daerah 68

Tabel 4.5 Proyeksi Indikator Kinerja Kunci 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)	10
Gambar 3.1	Konsep Renstra Dinas PMPTSP	27
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas PMPTSP	28
Gambar 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas PMPTSP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam rangka mengoptimalkan peran Dinas PMPTSP sebagai leading sector dalam upaya peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Renstra ini didasari oleh beberapa pertimbangan mendasar yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Hal ini penting untuk memastikan sinergi dan keterpaduan program pembangunan di tingkat daerah.

Dinamika global, nasional, maupun regional menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan yang semakin menekankan pada investasi sebagai motor penggerak ekonomi. Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan keindahan bahari yang memukau, memiliki daya tarik yang signifikan bagi para investor. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik, dan berkelanjutan.

Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel semakin meningkat. Dinas PMPTSP sebagai gerbang utama perizinan dan nonperizinan memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan menjadi keniscayaan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Dinas PMPTSP. Pemanfaatan TIK secara optimal dalam pelayanan perizinan dan pengelolaan data investasi

menjadi kunci untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Transformasi digital dalam pelayanan publik akan menjadi fokus utama untuk menghadirkan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Isu-isu strategis seperti keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra ini. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat Kepulauan Selayar.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Renstra Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berdaya saing. Renstra ini juga akan menjadi landasan bagi setiap pegawai dan pemangku kepentingan untuk bekerja secara terarah dan terukur demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 adalah:

1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Insetif dan/atau Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 121;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor … Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ……;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138;
31. Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2024 Nomor 135);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 meliputi:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah oleh Dinas PMPTSP yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan daerah Kabupaten kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029;
2. Menjadipanduan dalam pengendalian dan evaluasi target kinerja Dinas PMPTSP selama tahun 2025-2029.

Berdasarkan maksud tersebut, maka penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 bertujuan:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program RPJMD dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pada tingkat perangkat darah;
2. Menyelaraskan Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
3. Menyediakan dokumen yang digunakan oleh Kepala Dinas PMPTSP untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP);
5. Memudahkan pengukuran pencapaian tujuan Dinas PMPTSP;
6. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaaan koordinasi dengan dengan instansi terkait, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
7. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Selayar 2025 - 2029 di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian: latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Subbab gambaran pelayanan pernagkat daerah: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk Capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan kelompok sasaran layanan (misalnya Bapperida, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). Ditambahkan subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah: Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada), Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada), Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada); Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah, Permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat: Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian (subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif), uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PMPTSP)

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas PMPTSP

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kedudukan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja. Dinas PMPTSP yang menyelenggarakan fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana mewujudkan visi dan misi Kabupaten kepulauan Selayar serta menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementrian sebagimana tertuang dalam Renstra tahun 2025 - 2029.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sesuai kebijkasanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapkan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP);
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris terdiri dari;
   a. Subbagian Umum; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 2.1

Struktur organisasi
Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Selayar

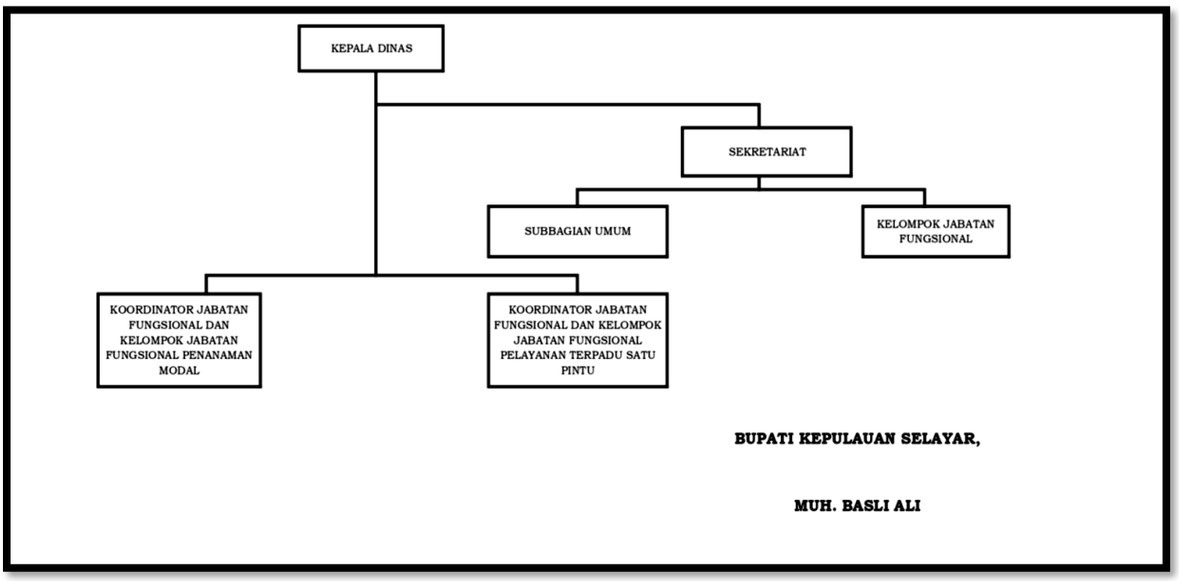

Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar keadaan pada Januari 2025 berjumlah 24 orang PNS, 2 orang PPPK, 10 orang staf Non ASN (lihat Tabel 2.1.) di bawah ini:

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas PMPTSP

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Sub. Bagian Umum	1 Orang
4.	Koordinator Jabatan Fungsional	2 Orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	10 Orang
6	Jabatan Fungsional Umum	9 Orang
7.	PPPK	2 Orang
8.	Staff Non ASN	12 Orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP*, 1 Juni 2025*

Tabel 2.2
Komposisi Eselon Sumber Daya Aparatur Dinas PMPTSP

No.	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	1

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP*, 1 Juni 2025*

Dinas PMPTSP memiliki komposisi aparatur seperti apa yang telah digambarkan di atas adalah memiliki aparatur yang memiliki Eselon II yang diduduki oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, sedangkan Eselon IV di duduki oleh Kepala Sub Bagian. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang Dinas PMPTSP

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	IX	2 Orang
2	I/a	- Orang
3	I/b	- Orang
4	I/c	- Orang
5	I/d	- Orang
6	II/a	- Orang
7	II/b	- Orang
8	II/c	1 Orang
9	II/d	1 Orang
10	III/a	3 Orang
11	III/b	1 Orang
12	III/c	3 Orang
13	III/d	10 Orang
14	IV/a	2 Orang
15	IV/b	2 Orang
16	IV/c	1 Orang
17	Pegawai Harian Lepas	14 Orang
18	Penata Taman	5 Orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP*, 1 Juni 2025*

Berdasarkan tabel di atas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/c yang berjumlah 1 orang. Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas PMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	6 orang
2	Strata Satu (S1)	13 orang
3	Diploma 3 (D3)	1 orang
4	SLTA	5 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP*, 1 Juni 2025*

Berdasarkan komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah SLTA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)
1 Juni 2025

No.	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Sespa/Spamen/PIM II	- orang
2	Spadya/Spama/PIM III	1 orang
3	Spada/Adum/PIM IV	- orang
Jumlah		2 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP*, Juni 2025*

2) Keadaan Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana Perkantoran merupakan komponen penting sebagai penunjang pelaksanaan tugas operasional Pelayanan, keadaan sarana dan prasarana perkantoran Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 2.6
Data Aset dan Kondisinya

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Kondisi		Jumlah barang terpakai	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) Roda Empat	2 Unit	1 Unit	1 Unit	2014, 2015

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Kondisi		Jumlah barang terpakai	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	Sepeda Motor	13 Unit		13 Unit	2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2018, 2019, 2021
3	Lemari Besi/Metal	10 Unit	2 Unit	8 Unit	2006, 2009, 2011, 2012
4	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6 Unit		6 Unit	2016, 2017, 2018
5	Filing Cabinet Besi	9 Unit		9 Unit	2006, 2015, 2018, 2021
6	CCTV - Camera Control Television System	7 Unit	2 Unit	5 Unit	2019, 2021
7	Papan Visual/Papan Nama(PAPAN INFORMASI PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL)	3 Unit		3 Unit	2013, 2014
8	Papan Visual/Papan Nama(Papan Informasi Electronik)	1 Unit		1 Unit	2015
9	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit		1 Unit	2010
10	Papan Pengumuman	2 Unit		2 Unit	2021
11	Meja Kerja Kayu	13 Unit	4 Unit	9 Unit	2017
12	Meja Rapat (MPP)	6 Unit		6 Unit	2021
13	Meja 1/2 Biro	41 Unit		41 Unit	2017, 2018, 2019
14	Meja Kerja Pejabat Eselon II & III	6 Unit		6 Unit	2018, 2019
15	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II(MEJA TAMU SOFA)	1 Unit		1 Unit	2017
16	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III (meja tamu)	1 Unit		1 Unit	2018
17	Meja Rapat Pejabat lainnya	2 Unit		2 Unit	2018
18	Meja Kerja Kayu	13 Unit		13 Unit	2017
19	Kursi Besi/Metal	93 Unit	5 Unit	88 Unit	2012, 2019
20	Kursi Rapat (MALL PELAYANAN PUBLIK)	67 Unit		67 Unit	2018, 2021
21	Kursi Tamu PENDEK (SIANTANO)	2 Unit		2 Unit	2017
22	Kursi Besi/Metal (kursi Tunggu 4 seri)	7 Unit	1 Unit	6 Unit	2009, 2012, 2021
23	Kursi Tamu(SOFA, MENJANGAN, UKIR ETNIS)	3 set		3 Unit	2021
24	Kursi Putar (FRONT LINE, brother / SANDARAN RENDAH)	52 Unit	6 Unit	46 Unit	2012, 2019, 2021
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon II, III, IV	8		8	2018
26	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4		4	2018
27	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1		1	2017
28	A.C. Sentral (FLOOR STANDING POLYTRON PSF 2003-1)	1 Unit		1 Unit	2021
29	A.C. Window/Split (1 pk Panasonic, sharp, LG)	9 Unit		9 Unit	2018, 2021
30	A.C. Window/Split (2 pk Panasonic, Sharp)	10 Unit		10 Unit	2018, 2019, 2021
31	A.C. Window/Split (1 1/2 pk Panasonic, Sharp)	2 Unit		2 Unit	2014, 2015
32	A.C. Window/Split (1/2 pk Sharp)	1 Unit		1 Unit	2015
33	A.C. Window/Split (Panasonic, Sharp)	3 Unit		3 Unit	2009, 2014
34	Kipas Angin (miyako biasa, Miyako turbo)	4 Unit		4 Unit	2017, 2018, 2019
35	Alat Pendingin lainnya (Turbin Ventilator)	1 Unit		1 Unit	2022

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Kondisi		Jumlah barang terpakai	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
36	Televisi (LG, Samsung, Haler)	8 Unit		8 Unit	2009, 2015, 2017, 2018, 2021
37	Sound System (keyboard, mixer, speaker aktive, mic)	7 Unit		7 Unit	2011, 2018,
38	Dispenser (miyako, midea)	6 Unit		6 Unit	2016, 2017, 2021
39	P.C Unit (Lenovo, Samsung,Zyrex, Acer)	23 Unit	4	19 Unit	2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2018, 2021
40	Lap Top/Note Book (Acer, Lenovo, Thosibah, Hp, Asus)	28 Unit		28 Unit	2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024
41	Printer (Peralatan Personal Komputer) CANON/EPSON	22 Unit		22 Unit	2009, 2011, 2013, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024
42	Scanner (Peralatan Personal Komputer) FUJITSU/	3 Unit		3 Unit	2017, 2021, 2023
43	Peralatan Personal Komputer lainnya (CATION, REMINGTON)	3 Unit	3 Unit	0 Unit	2013
44	Mesin Pemotong Rumput Rumout STIHL FR 3001	2 Unit		2 Unit	2011, 2022
45	Wireless	2 Unit		2 Unit	2009, 2015
46	Wireless (Sound Speaker)	1 Unit		1 Unit	2022
47	Unit Power Supply (APC)	9 Unit		9 Unit	2010, 2021
48	Tangga Aluminium	1 Unit		1 Unit	2016
49	Alat Pemadam/Portable	5 Unit		5 Unit	2018
50	Layar Film/Projector (Acer)	2 Unit	1 Unit	1 Unit	2016
51	Kompas Geologi	1 Unit	1 Unit	0 Unit	2008
52	Pesawat Telephone (PNSN)	1 Unit	1 Unit	0 Unit	2011
53	Hard Disk	2 Unit		2 Unit	2011
54	Modem	3 Unit		3 Unit	2013
55	Server (wi - fi extender)	2 Unit		1	2016, 2025

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP*, 1 Juni 2025*

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) 2021-2025 Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikategorikan dalam 2 (lima) peran, yaitu:

1. Promosi Penanaman Modal;
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kedua kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Untuk mengukur kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tugas dan fungsi yang dikategorikan dalam 8 (delapan) peran utama di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja IKK
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2020-2022

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
NO	PROGRAM	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	1,203,772,558	4,970,324,600	-	1,146,277,658	4,893,180,841	-	95.22	98.45	3,165,579,215	3,097,113,792
2	Program Promosi Penanaman Modal	164.518.000	164,518,000	154,662,000	163.643.000	163,643,000	148,752,366	99,46	99.47	96.18	249,795,000	247,958,142
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	12,264,120	393,394,000	-	12,253,820	319,688,000	-	99.92	81.26	336,164,530	242,829,455
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.330.000,-	1,330,000	40,000,000	1.330.000,-	1,330,000	39,014,000.00	100	100	97.54	35,332,500	34,246,950
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	51.108.800,-	47,365,640	187,678,000	51.107.228	47,364,854	187,651,400	99,99	100	99.99	94,723,910	94,601,964
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	10,000,000	21,250,000	-	9,999,214	21,184,000.00	-	99.99	99.69	11,808,500	11,778,304

Tabel 2.8
Capaian Kinerja IKK
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2023-2024

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE-		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
NO	PROGRAM	2023	2024	2023	2024	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,244,109,850	3,244,109,850	3,174,498,335	3,174,498,335	97.85	97.85	3,165,579,215	3,097,113,792
2	Program Promosi Penanaman Modal	340,000,000	340,000,000	339,437,200	340,000,000	99.83	99.83	249,795,000	247,958,142
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	469,500,000	469,500,000	319,688,000	319,688,000	66.98	66.98	336,164,530	242,829,455
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50,000,000	50,000,000	48,321,900	48,321,900	96.64	96.64	35,332,500	34,246,950
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	71,926,000	71,926,000	71,695,800	71,695,800	99.67	99.67	94,723,910	94,601,964
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	7,992,000	7,992,000	7,965,000	7,965,000	99.66	99.66	11,808,500	11,778,304

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2020	Realisasi	TARGET 2021	Realisasi	TARGET 2022	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*						
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP					Sesuai	Sesuai
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP					70,00%	88,50%
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)						
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	95 %	81,67 %	95,00 %	83,66 %		
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Juta Rupiah)					38.000 (Juta)	11.056(Juta)
		Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)					1,00 ($)	0,12 ($)
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional (Juta Rupiah)	56.605 (Juta)	845.080 (Juta)	62.256 (Juta)	67.442 (juta)		
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA (Juta Rupiah)	10..500.000	31.332.437	21.000($)	359.382($)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	95 %	81,67 %			70,00%	88,50%

Tabel 2.10
Capaian kinerja pelayanan dinas PMPTSP kabupaten kepulauan selayar
Setelah perubahan tahun 2023-2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2023	Realisasi	TARGET 2024	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*				
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	65,00 (B)	75,74	70,00 (B)	75,74
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	60,77 (B)	60,77	70,00 (B)	60,77
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	72,50%	78,30	75,00%	81,38
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Juta Rupiah)	1,50 %	494,77	2,00 %	-62,69
		Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	6,00%	44,80	9,00%	19,05
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional (Juta Rupiah)	10,00%	413,51	15,00%	-59,50
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA (Juta Rupiah)	4,00%	857,5	6,00%	-86,89
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	84,00%	85,28	86,00%	88,15

Berdasarkan tabel realisasi kinerja pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) 2020-2024 Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan tujuan utama untuk meningkatkan investasi. Renstra ini mengidentifikasi beberapa isu strategis, seperti belum optimalnya data promosi investasi dan terbatasnya aksesibilitas ke Selayar. Untuk mengatasi isu tersebut, Dinas PMPTSP telah merumuskan berbagai strategi, termasuk peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya APBD yang diberikan kepada OPD sehingga difokuskan pada program yang lebih *urgent* (prioritas).

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas PMPTSP

Sebagai ujung tombak dalam memfasilitasi masuknya investasi dan memberikan kemudahan perizinan, Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar hadir dengan komitmen untuk menjadi mitra strategis bagi seluruh pihak. Selain menerbitkan izin, tetapi juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing. kelompok sasaran layanan yang beragam, mencakup berbagai pihak antara lain:

a. Pelaku Usaha/Investor

   Merupakan kelompok sasaran paling vital, karena merekalah yang akan menggerakkan roda ekonomi melalui investasi. Kelompok ini terbagi atas: Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Investor Menengah dan Besar, dan koperasi. Layanan yang dibutuhkan adalah perizinan berusaha melalui OSS-RBA, layanan konsultasi investasi (investment advisory), fasilitasi pertemuan dengan instansi terkait, hingga pendampingan dalam memenuhi persyaratan dan penyelesaian masalah.

b. Masyarakat Umum/Individu

   Layanan yang dibutuhkan adalah penerbitan IMB/PBG, dan perizinan lain yang menjadi kewenangan daerah. Penyediaan data dan informasi investasi melalui website, brosur, atau layanan konsultasi dan pengaduan langsung.

c. Instansi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Lainnya

   Layanan yang dibutuhkan adalah Pelaporan realisasi investasi secara berkala, koordinasi kebijakan sektoral, dan fasilitasi komunikasi antara investor dengan kementerian/lembaga terkait. Pengajuan permohonan rekomendasi teknis dari OPD terkait, fasilitasi rapat koordinasi lintas OPD, dan percepatan proses pelayanan, dan Sosialisasi kebijakan dan regulasi baru, fasilitasi forum dialog investasi, dan penerimaan masukan dari pelaku usaha.

Secara keseluruhan, Dinas PMPTSP bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada semua pihak yang terlibat dalam ekosistem penanaman modal dan perizinan, dengan fokus utama pada memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.5. Mitra Dinas PMPTSP dalam Memberikan Pelayanan

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi pemerintah untuk menyatukan berbagai jenis pelayanan publik dalam satu lokasi, mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Kabupaten Kepulauan Selayar, MPP memiliki peran penting, terutama mengingat wilayahnya yang berbentuk kepulauan. MPP mengintegrasikan pelayanan dari berbagai instansi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN/BUMD, dan bahkan swasta.

1. **Instansi Vertikal (Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah)**

   Lembaga di bawah kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki kantor perwakilan yang menjadi mitra di MPP Selayar umumnya mencakup:

   a. Polres Kepulauan Selayar;
   b. Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar;
   c. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kepulauan Selayar;
   d. BPJS Kesehatan;
   e. BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
   f. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pratama Bulukumba (Wilayah Kerja Selayar);
   g. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar;
   h. Pengadilan Negeri Selayar; dan
   i. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

2. **Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan**

   UPT Samsat Selayar: Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

3. **Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar**

   Instansi naungan pemerintah daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mitra utama dari kategori ini adalah:

   a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP): Sebagai penyelenggara MPP, melayani berbagai jenis

perizinan usaha (seperti NIB) dan non-usaha;

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Pelayanan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan KIA;

c. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD): Pelayanan pembayaran pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMPTSP

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Perusahaan milik negara yang layanannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari adalah PT Bank Sulselbar: Layanan perbankan, pembayaran pajak/retribusi daerah, dan layanan keuangan lainnya.

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perusahaan milik Daerah yang layanannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari adalah PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum): Layanan pengaduan konsumen.

Kolaborasi para mitra ini memiliki peran strategis yaitu Integrasi Layanan dengan menyatukan puluhan hingga ratusan jenis layanan dalam satu gedung, menghilangkan kebutuhan masyarakat untuk berpindah-pindah lokasi. Efisiensi Waktu dan Biaya bagi Masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya transportasi karena semua urusan dapat diselesaikan di satu tempat. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikdengan standar pelayanan yang terukur, transparan, dan akuntabel di bawah pengawasan terpusat. Mendorong Investasi dengan memberi kemudahan dalam mengurus perizinan di MPP diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kepulauan Selayar, yang pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi daerah. Dengan adanya sinergi antar semua mitra ini, Mal Pelayanan Publik Selayar berfungsi sebagai pusat layanan modern yang menjadi wajah birokrasi yang melayani dan mendukung pembangunan daerah.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah. Bentuk Kerjasama Lembaga di bawah kementerian

atau lembaga pemerintah non-kementerian di MPP Selayar umumnya mencakup:

a. Polres Kepulauan Selayar: Pelayanan perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan layanan kepolisian lainnya.
b. Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar: Layanan terkait informasi pertanahan, pendaftaran hak, dan sejenisnya.
c. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kepulauan Selayar: Layanan pendaftaran haji dan urusan keagamaan lainnya.
d. BPJS Kesehatan: Pendaftaran peserta baru, perubahan data, dan pemberian informasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
e. BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek): Pendaftaran dan informasi program jaminan sosial bagi para pekerja.
f. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pratama Bulukumba (Wilayah Kerja Selayar): Layanan konsultasi perpajakan, pendaftaran NPWP, dan pelaporan SPT.
g. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar: Layanan seperti konsultasi hukum.
h. Pengadilan Negeri Selayar: Layanan informasi dan pengaduan terkait pelayanan atau perkara.
i. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar: Layanan Easy passport.

2.2. Pemasalahan dan Isu Strategis Dinas PMPTSP

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP

Kinerja Dinas PMPTSP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum optimal. Penyebab persoalan tersebut terjadi disebabkan oleh:

1. Data informasi tentang potensi dan peluang Investasi belum optimal;
2. Belum optimalnya infrastruktur yang mendukung investasi;
3. Skema Investasi yang diharapkan oleh Bank Indonesia dan Kementrian Investasi adalah KPBU, di mana syarat utama Investasi KPBU mewajibkan lahan milik Pemerintah;
4. Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai. ; dan
5. Belum optimalnya capaian kinerja Dinas PMPTSP.

Tabel 2.11.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMPTSP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya daya saing daerah dalam menarik investor	a. Data informasi tentang potensi dan peluang Investasi belum optimal; b. Belum optimalnya infrastruktur yang mendukung investasi.	1) Ketersediaan data informasi dan peta potensi Investasi belum optimal; dan 2) Terbatasnya lahan pemda untuk lokasi Investasi skema KPBU. 3) Daya tarik investasi yang belum meningkat; dan 4) Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak masuk dalam daerah lintasan
2	Rendahnya capaian nilai realisasi investasi	Skema Investasi yang diharapkan oleh Bank Indonesia dan Kementrian Investasi adalah KPBU, di mana syarat utama Investasi KPBU mewajibkan lahan milik Pemerintah	1) Belum optimalnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); dan
3	Pelayanan penanaman modal belum optimal	Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai	1) Gedung MPP belum representatif; dan 2) Belum adanya Tim Teknis yang dapat mengeluarkan surat rekomendasi secara langsung yang ditempatkan secara permanen di Dinas MPP Selayar.
4	Masih rendahnya tata kelola pemerintahan Dinas PMPTSP	Belum optimalnya capaian kinerja Dinas PMPTSP	Masih rendahnya kompetensi dan kuantitas SDM aparatur

Permasalahan pelayanan Dinas PMPTSP dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu daya saing daerah dalam menarik investor, realisasi investasi yang masih rendah, dan Pelayanan penanaman modal belum optimal. Ketiga aspek ini berperan penting dalam peningkatan kinerja mewujudkan visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar.

2.2.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan dinas, sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi dinas.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis pelayanan Dinas PMPTSP berikut ini:

Tabel 2.12
Isu Strategis Dinas PMPTSP

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP	Permasalahan Dinas PMPTSP	Isu KLHS yang relevan dengan Dinas PMPTSP	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas PMPTSP			Isu strategis Dinas PMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Sektor ekonomi (Pertanian, Perkebunan dan Perikanan)	Data informasi tentang potensi dan peluang Investasi belum optimal	Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai nilai tambah ekonomi daerah	Tuntutan investasi berkelanjutan (ESG) & SDGs	Kebijakan hilirisasi sumber daya alam & ekonomi hijau	Persaingan antar daerah dalam menarik investasi	Peningkatan Iklim Investasi
	Belum optimalnya infrastruktur yang mendukung investasi.	Infrastruktur	Perkembangan teknologi infrastruktur & konektivitas globa	Proyek Strategis Nasional (PSN) & Pembangunan IKN	Peningkatan konektivitas antar wilayah & pusat produksi	Peningkatan sarana dan prasarana Investasi
	Skema Investasi yang diharapkan oleh Bank Indonesia dan Kementrian Investasi adalah KPBU, di mana syarat utama Investasi KPBU	Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai nilai tambah ekonomi daerah	Persaingan global untuk modal investasi & tren Public-Private Partnership (PPP)	Kemudahan berusaha (UU Cipta Kerja) & insentif investasi	Ketersediaan lahan clean and clear & kepastian hukum di daerah	Peningkatan minat investasi

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP	Permasalahan Dinas PMPTSP	Isu KLHS yang relevan dengan Dinas PMPTSP	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas PMPTSP			Isu strategis Dinas PMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	mewajibkan lahan milik Pemerintah					
	Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai	Infrastruktur	Tren E-Government dan pelayanan publik digital	Sistem Online Single Submission (OSS) & Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Keterbatasan anggaran daerah untuk teknologi informasi	Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai
	Belum optimalnya capaian kinerja Dinas PMPTSP	Tata Kelola Pemerintahan	Good Governance	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Kualitas pelayanan publik	Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Tabel 2.1, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memetakan dengan menghubungkan potensi daerah dan permasalahan internal dinas dengan isu-isu lingkungan yang dinamis di tingkat global, nasional, dan regional. Dari analisis ini, teridentifikasi lima isu strategis utama yang menjadi fokus untuk perbaikan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

1. Peningkatan Iklim dan Minat Investasi

Isu strategis ini muncul dari kesenjangan antara potensi ekonomi daerah yang besar, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, dengan permasalahan klasik yaitu belum optimalnya ketersediaan data dan informasi mengenai peluang investasi. Kondisi ini diperkuat oleh isu lingkungan strategis (KLHS) yang menuntut penerapan ekonomi hijau dan biru sebagai nilai tambah. Secara eksternal, Dinas PMPTSP dihadapkan pada tuntutan global untuk investasi berkelanjutan yang memenuhi kriteria ESG (Environmental, Social, Governance) dan SDGs. Di tingkat nasional, kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja menjadi pendorong utama. Sementara itu, di tingkat regional, persaingan antar daerah dalam menarik modal menjadi tantangan nyata. Oleh karena itu, peningkatan iklim dan minat investasi menjadi krusial, termasuk melalui adaptasi skema modern seperti KPBU yang memerlukan kepastian hukum dan ketersediaan lahan.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana (Investasi & Kelembagaan)

Identifikasi isu ini didasari oleh dua permasalahan utama: belum optimalnya infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan investasi di daerah, serta belum memadainya sarana dan prasarana internal kelembagaan Dinas PMPTSP itu sendiri. Kedua masalah ini sama-sama berada di bawah isu KLHS "Infrastruktur". Dari sisi lingkungan dinamis, tren global mengarah pada konektivitas dan *E-Government* (pelayanan publik digital). Pemerintah pusat mendorong ini melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS). Namun, tantangan di tingkat regional seringkali adalah keterbatasan anggaran untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan sarana prasarana investasi (seperti jalan dan akses ke lokasi potensial) dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan (seperti sistem teknologi informasi) menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan untuk menciptakan pelayanan yang prima.

3. Reformasi Birokrasi

Isu strategis ini berakar dari permasalahan fundamental, yaitu belum optimalnya capaian kinerja Dinas PMPTSP. Hal ini selaras dengan isu KLHS mengenai "Tata Kelola Pemerintahan". Tuntutan untuk perbaikan datang dari semua tingkatan: di tingkat global ada standar universal mengenai Good Governance; di tingkat nasional, pemerintah menekankan pentingnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih; dan di tingkat regional, masyarakat menuntut kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Kombinasi dari permasalahan internal dan tekanan eksternal ini menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai isu strategis yang mendesak untuk diwujudkan demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja dinas.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya, Dinas PMPTSP tidak hanya harus mengatasi kelemahan internalnya, tetapi juga harus mampu beradaptasi secara proaktif terhadap dinamika lingkungan eksternal yang kompleks dan terus berubah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan di susun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas PMPTSP

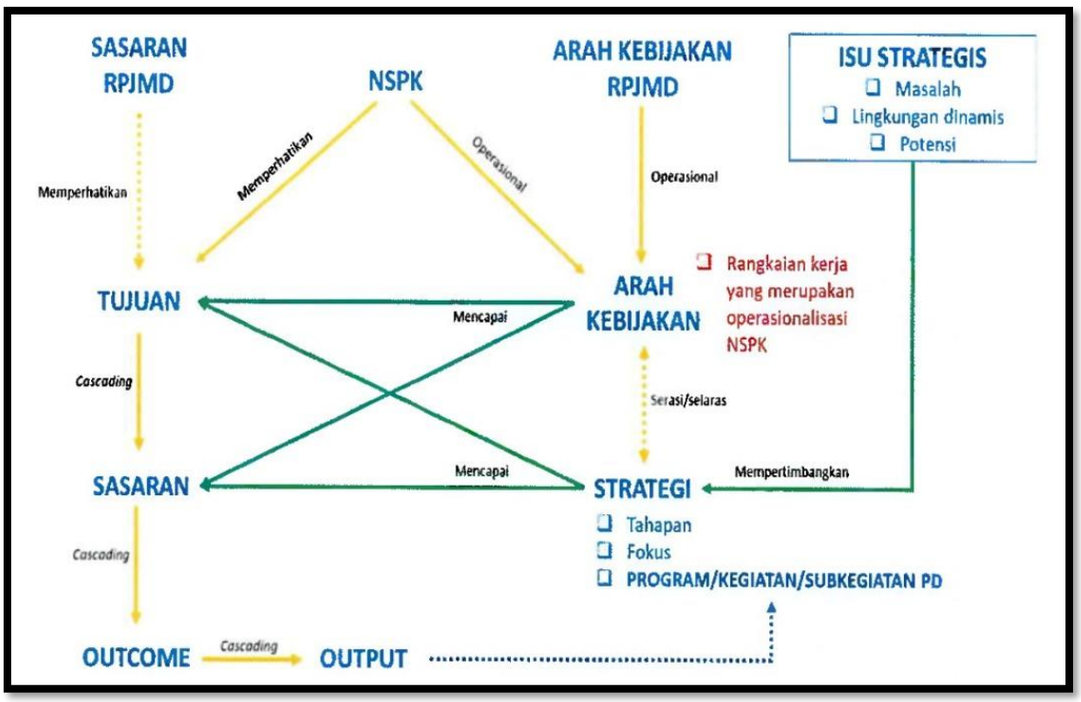

Konsep Renstra Dinas PMPTSP merupakan kerangka perencanaan strategis yang mengintegrasikan kebijakan makro RPJMD dengan standar teknis NSPK melalui proses cascading yang sistematis, mulai dari penetapan tujuan hingga pencapaian outcome. Dalam alur ini, perangkat daerah merumuskan arah kebijakan dan strategi berdasarkan isu-isu strategis seperti masalah, lingkungan dinamis, dan potensi wilayah guna memastikan seluruh Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan selaras dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Intinya, diagram ini menggambarkan bagaimana mandat pembangunan daerah dioperasionalkan secara teknis melalui sinergi antara strategi yang tepat dan output kerja yang terukur demi mencapai tujuan organisasi.

Gambar 3.2.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas PMPTSP

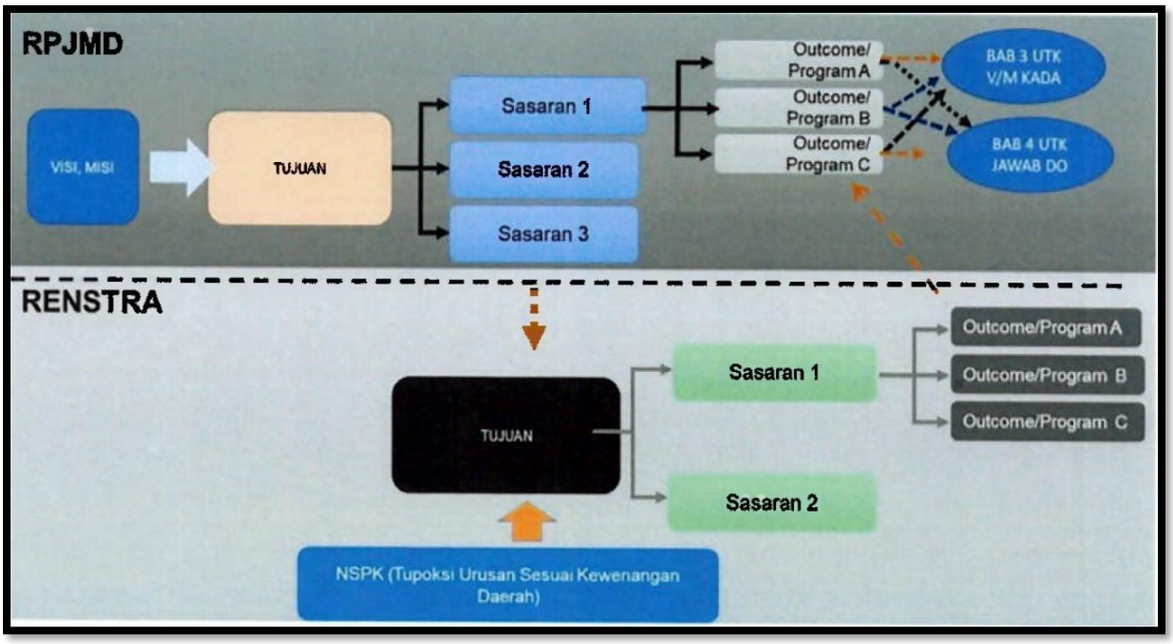

Alur penyelarasan antara dokumen perencanaan makro daerah (RPJMD) dengan dokumen teknis operasional (Renstra), di mana visi dan misi kepala daerah diturunkan menjadi tujuan, sasaran, dan outcome program yang saling terintegrasi. Pada level RPJMD, sasaran pembangunan dijabarkan untuk mendukung visi-misi dan tanggung jawab daerah, sementara pada level Renstra, penetapan tujuan organisasi tidak hanya mengacu pada sasaran RPJMD tetapi juga wajib berpedoman pada NSPK (Tupoksi Urusan Sesuai Kewenangan Daerah) guna memastikan legalitas teknis. Hubungan ini menunjukkan adanya mekanisme cascading di mana outcome program pada Renstra harus selaras dengan program yang ada di RPJMD untuk memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara terukur dan sinkron antara janji politik dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah.

3.1. Tujuan Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinas PMPTSP adalah suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode 2025-2029 ke depan yang mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana muatan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah sistematis, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis

pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaianyang telah dilaksanakan.

Tujuan penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2025-2029, yaitu **"Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera"** dengan penjabaran misi yang diintervensi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut

Misi ke-1: Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif, dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;

Misi ke-3: Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah, dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing

Dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan daerah tersebut, Dinas PMPTSP mengintegrasikan ke dalam Tujuan Perangkat Daerah, yaitu **"Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah"**. Sasaran (8) RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.2. Sasaran Renstra Dinas PMPTSP 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu : sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas PMPTSP dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas PMPTSP
2) Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PMPTSP

b. Meningkatnya investasi

3) Realisasi investasi PMDN/PMA (Juta Rupiah)
4) Jumlah Investor berskala nasional

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas PMPTSP

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif (S-1)	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	62,54	64,91	68,41	70,32	72,97	74,81	IUP
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	63,59 (Cukup Baik)	63,59 (Cukup Baik)	64,50 (Cukup Baik)	65,52 (Cukup Baik)	66,39 (Cukup Baik)	67,01 (Cukup Baik)	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PMPTSP	88,00	88,89	89,64	90,39	91,14	91,89	
Meningkatnya pertumbuhan investasi Daerah (S-8)	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Investasi	9,09%	10,94%	11,30%	12,21%	13,04%	14,41%	
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi investasi PMDN/PMA (Juta Rupiah)	36.800	38.100	40.300	42.500	44.700	46.900	

Cat.
Berlaku pada Kondisi ***ceteris paribus***, dimana asumsi dalam ilmu ekonomi dan ilmiah lain yang berarti "semua hal lain dianggap sama" atau konstan, sehingga analisis dapat difokuskan pada hubungan sebab-akibat antara dua variabel tanpa dipengaruhi oleh faktor lain yang berubah.

Tabel 3.2. Tahapan Renstra Dinas PMPTSP

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 8. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanaman modal dan Mal Pelayanan Publik	Peningkatan Iklim Investasi	Digitalisasi pelayanan terpadu satu pintu	Promosi Investasi Proyek strategis Daerah	Penguatan kemitraan strategis Investor dengan masyarakat

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas PMPTSP Kebupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap misi Renstra Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada table 3.5 di bawah.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Dinas PMPTSP yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan

d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Dinas PMPTSP agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pada setiap misi Renstra Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3.3 Arah kebijakan Renstra Dinas PMPTSP

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PMPTSP	KET.
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik Dinas PMPTSP	
			Meningkatkan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik	
2	Iklim Investasi	Menciptakan iklim usaha untuk menarik investasi	Menyusun RUPM dan regulasi pendukung Iklim Investasi lainnya	
			Penyediaan Peta Investasi Digital	
			Mengoptimalkan Website dan aplikasi pendukung pelayanan penanaman modal	
3	Kerjasama Investasi		Meningkatkan investasi melalui promosi potensi daerah, dukungan regulasi kemudahan investasi di daerah	
4	Realisasi Investasi		Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi untuk memastikan kepatuhan dan pencapaian target	

Tabel 3.4
Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi Dinas PMPTSP

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan dan kolaboratif (S-1)	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik Dinas PMPTSP	Peningkatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan pelayanan prima.
			Meningkatkan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik	Mengintegrasikan berbagai jenis layanan (perizinan, kependudukan, dll.) dalam satu sistem dan lokasi yang representatif.
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah (S-8)	Meningkatkan Investasi	Meningkatnya investasi	Menyusun RUPM dan regulasi pendukung Iklim Investasi lainnya	Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor.
			Penyediaan Peta Investasi Digital	Mengidentifikasi dan memetakan potensi serta peluang investasi unggulan daerah yang siap ditawarkan (ready to offer).
			Mengoptimalkan Website dan aplikasi pendukung pelayanan penanaman modal	Mengembangkan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik yang terintegrasi (Online Single Submission/OSS).
			Meningkatkan investasi melalui promosi potensi daerah, dukungan regulasi kemudahan investasi di daerah	Menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam forum promosi investasi (pameran, business matching) di tingkat regional, nasional, dan internasional.
			Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi untuk memastikan kepatuhan dan pencapaian target	Melakukan pemantauan rutin dan fasilitasi penyelesaian masalah terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha.

Berdasarkan Tabel 3.3, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan beberapa arah kebijakan yang didasarkan pada operasionalisasi NSPK. Untuk Standar pelayanan publik dan prosedur operasional teknologi informasi, arah kebijakannya adalah melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta mengoptimalkan *website* dan aplikasi pendukung. Dalam hal Norma kelembagaan dan standar regulasi, dinas berencana meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penataan regulasi melalui peningkatan disiplin dan kapasitas ASN, penyusunan data dan laporan yang akuntabel, serta penyusunan RUPM dan regulasi pendukung investasi lainnya. Terkait Prosedur manajemen risiko dan kriteria pengendalian pembangunan, arah kebijakannya mencakup penyediaan mobil perizinan keliling serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi. Selanjutnya, untuk Standar kompetensi dan kriteria penilaian kinerja ASN, fokusnya adalah meningkatkan kualitas ASN berbasis merit melalui peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur. Terakhir, untuk Norma kerja sama daerah dan standar penataan investasi, dinas akan meningkatkan dan menata kerja sama daerah dengan menyusun RUPM dan regulasi pendukung, serta menyediakan peta investasi digital.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Strategi dan kebijakan ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program adalah dokumen detail yang menguraikan serangkaian kegiatan terstruktur dan terkoordinasi yang dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan spesifik dalam jangka waktu tertentu. Program merupakan perwujudan konkret dari strategi dan kebijakan yang lebih luas, menerjemahkan arah besar menjadi langkah-langkah yang bisa dilaksanakan.

Kegiatan adalah langkah operasional yang lebih konkret dan merupakan penjabaran langsung dari suatu program. Setiap kegiatan terdiri dari serangkaian tindakan atau upaya terstruktur yang didesain untuk menghasilkan keluaran (output) yang spesifik dan terukur. Keluaran ini menjadi kontributor utama terhadap pencapaian hasil yang diharapkan dari program.

Sub Kegiatan adalah tingkatan perencanaan yang paling detail dan operasional, merupakan rincian langsung dari suatu kegiatan. Ini adalah aktivitas-aktivitas mikro atau langkah-langkah teknis yang secara langsung dilaksanakan di lapangan untuk menghasilkan keluaran dari kegiatan.

Program yang akan dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk selanjutnya pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar lima tahun kedepan.

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya

kesinambungan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Selayar 2030.

Gambar 4.1

Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas PMPTSP

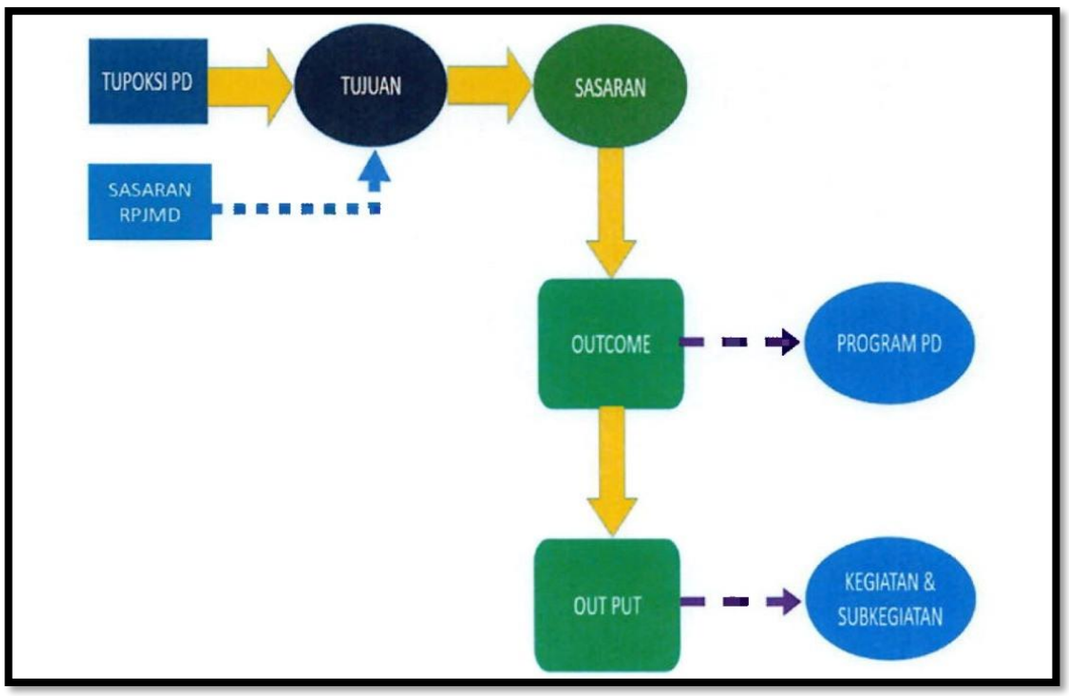

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dalam Rencana Strategis ini ditetapkan program dan indikasi kegiatan dalam periode tahun 2025-2029. Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKP
e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

i) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
j) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
k) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
l) Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
m) Sinkronisasi danHarmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Dearah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) PenyediaanAdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
d) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
e) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
f) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
g) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah

a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
b) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
f) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
g) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
h) Pemindahan Tugas ASN
i) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
j) Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
k) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g) Penyediaan Bahan/Material
h) Fasilitasi Kunjungan Tamu
i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pengadaan Alat Besar
d) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
e) Pengadaan Mebel
f) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
h) Pengadaan Aset Tak Berwujud
i) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
j) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
k) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) PenyediaanJasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
d) PenyediaanJasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
e) Pemeliharaan Mebel
f) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
h) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
i) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
j) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya
k) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
l) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
b) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
b) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
c) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

d) Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
e) Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam

3. Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota

a) Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota

4. Kemitraan Usaha Nasional

a) Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar

5. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota

a) Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota

6. Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur

a) Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
b) Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
c) Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota

7. Kemitraan Usaha Nasional

a) Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar

8. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota

a) Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota

C. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
b) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
b) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
c) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
d) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
b) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
c) Pengawasan Penanaman Modal

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas PMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif (S-1)	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1. Nilai Sakip 2. Indeks Kepuasan Masyarakat		
			OC1.1.1 Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah		1. Persentase Capaian Kinerja Dinas PMPTSP 2. Persentase Capaian Realisasi Anggaran Dinas PMPTSP	**PROG.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				OT1.2.1 Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tertib waktu untuk menjamin kepastian pelaksanaan program dan akuntabilitas kinerja organisasi	**OT1.2.1 Persentase Dokumen /Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang di selesaikan**	**KEG.1.2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	
				OT1.2.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OT1.2.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUBKEG.1.2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
				OT.1.2.1.2 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	OT.1.2.1.2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SUBKEG.1.2.1.2 Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	
				OT1.2.1.3 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	OT1.2.1.3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SUBKEG.1.2.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	
				OT1.2.1.4 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	OT1.1.1.4Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	SUBKEG.1.2.1.4Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.	
				OT1.2.1.5 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	OT1.2.1.5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SUBKEG.1.2.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT1.2.1.6 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OT1.2.1.6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SUBKEG.1.2.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	
				OT1.2.1.7 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT1.2.1.7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUBKEG.1.2.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	
				OT1.2.1.8 Terlaksananya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	OT1.2.1.8 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	SUBKEG.1.2.1.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	
				OT1.2.1.9 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	OT1.2.1.9 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	SUBKEG.1.2.1.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	
				OT1.2.1.10 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OT1.2.1.10 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUBKEG.1.2.1.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
				OT1.2.1.11 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	OT1.2.1.11 Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	SUBKEG.1.2.1.11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD.	
				OT1.2.1.12 Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	OT1.2.1.12 Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	SUBKEG.1.2.1.12 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu.	
				OT1.2.1.13 Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	OT1.2.1.13 Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	SUBKEG.1.2.1.13 Sinkronisasi danHarmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.	
				OT1.2.2 Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**OT1.2.2 Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolan Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu**	**KEG.1.2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Dearah.**	
				OT1.2.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OT1.2.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SUBKEG.1.2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	
				OT1.2.2.2 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OT1.2.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUBKEG.1.2.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	
				OT1.2.2.3 Terlaksananya Penatausahaan dan	OT1.2.2.3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SUBKEG.1.2.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				OT1.2.2.4 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	OT1.2.2.4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SUBKEG.1.2.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.	
				OT1.2.2.5 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OT1.2.2.5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUBKEG.1.2.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	
				OT1.2.2.6 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	OT1.2.2.6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	SUBKEG.1.2.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.	
				OT1.2.2.7 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	OT1.2.2.7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SUBKEG.1.2.2.7 Koordinasi danPenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.	
				OT1.2.2.8 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	OT1.2.2.8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SUBKEG.1.2.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	
				OT1.2.3 Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**OT1.2.3 Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu**	**KEG.1.2.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				OT1.2.3.1 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	OT1.2.3.1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SUBKEG.1.2.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				OT1.2.3.2 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	OT1.2.3.2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SUBKEG.1.2.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				OT1.2.3.3 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	OT1.2.3.3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	SUBKEG.1.2.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	
				OT1.2.3.4 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	OT1.2.3.4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	SUBKEG.1.2.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				OT1.2.3.5 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OT1.2.3.5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUBKEG.1.2.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	
				OT1.2.3.6 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	OT1.2.3.6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUBKEG.1.2.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT1.2.3.7 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	OT1.2.3.7 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	SUBKEG.1.2.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.	
				OT1.2.4 Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**OT1.2.4 Persentase Dokumen/ Laporan Pendapatan Daerah yang diselesaikan terpat waktu**	**KEG.1.2.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.**	
				OT1.2.4.1 Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	OT1.2.4.1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	SUBKEG.1.2.4.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah. 01. 2,04. 0001	
				OT1.2.4.2 Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerahdan Kebijakan Retribusi Daerah	OT1.2.4.2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerahdan Kebijakan Retribusi Daerah	SUBKEG.1.2.4.2 AnalisadanPengembanganRetribusi Daerah, sertaPenyusunanKebijakan Retribusi Daerah.	
				OT1.2.4.3 Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	OT1.2.4.3 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	SUBKEG.1.2.4.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah.	
				OT1.2.4.4 Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	OT1.2.4.4 jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	SUBKEG.1.2.4.4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah.	
				OT1.2.4.5 Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	OT1.2.4.5 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	SUBKEG.1.2.4.5 Pengolahan Data Retribusi Daerah.	
				OT1.2.4.6 Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	OT1.2.4.6 Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	SUBKEG.1.2.4.6 Penetapan Wajib Retribusi Daerah.	
				OT1.2.4.7 Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	OT1.2.4.7 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	SUBKEG.1.2.4.7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.	
				OT1.2.5 Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**OT1.2.5 Persentase ASN Yang Memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik**	**KEG.1.2.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				OT1.2.5.1 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	OT1.2.5.1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	SUBKEG.1.2.5.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.	
				OT1.2.5.2 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	OT1.2.5.2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SUBKEG.1.2.5.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	
				OT1.2.5.3 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	OT1.2.5.3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SUBKEG.1.2.5.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	
				OT1.2.5.4 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	OT1.2.5.4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	SUBKEG.1.2.5.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	
				OT1.2.5.5 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OT1.2.5.5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	SUBKEG.1.2.5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.	
				OT1.2.5.6 Terlaksananya Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	OT1.2.5.6 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	SUBKEG.1.2.5.6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT1.2.5.7 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	OT1.2.5.7 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	SUBKEG.1.2.5.7 PemulanganPegawai yangMeninggal dalam Melaksanakan Tugas.	
				OT1.2.5.8 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	OT1.2.5.8Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	SUBKEG.1.2.5.8 Pemindahan Tugas ASN.	
				OT1.2.5.9 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OT1.2.5.9 JumlahPegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	SUBKEG.1.2.5.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	
				OT1.2.5.10 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	OT1.2.5.10 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	SUBKEG.1.2.5.10 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.	
				OT1.2.5.11 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	OT1.2.5.11 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SUBKEG.1.2.5.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	
				OT1.2.6 Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**OT1.2.6 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**	**KEG.1.2.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				OT1.2.6.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OT1.2.6.1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.2.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	
				OT1.2.6.2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OT1.2.6.2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.2.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	
				OT1.2.6.3 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	OT1.2.6.3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SUBKEG.1.2.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	
				OT1.2.6.4 Tersedianya Bahan Logistik Kantor	OT1.2.6.4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.2.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 01. 2,06. 0004	
				OT1.2.6.5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	OT1.2.6.5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SUBKEG.1.2.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	
				OT1.2.6.6 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	OT1.2.6.6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	SUBKEG.1.2.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	
				OT1.2.6.7 Tersedianya Bahan/Material	OT1.2.6.7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	SUBKEG.1.2.6.7 Penyediaan Bahan/Material.	
				OT1.2.6.8 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	OT1.2.6.8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SUBKEG.1.2.6.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu.	
				OT1.2.6.9 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OT1.2.6.9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUBKEG.1.2.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	
				OT1.2.6.10 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OT1.2.6.10 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SUBKEG.1.2.6.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	
				OT1.2.6.11 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	OT1.2.6.11 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUBKEG.1.2.6.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT1.2.7 Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**OT1.2.7 Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**KEG.1.2.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**	
				OT1.2.7.1 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OT1.2.7.1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
				OT1.2.7.2 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OT1.2.7.2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	
				OT1.2.7.3 Tersedianya Alat Besar	OT1.2.7.3 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.3 Pengadaan Alat Besar.	
				OT1.2.7.4 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	OT1.2.7.4 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.4 PengadaanAlat AngkutanDarat Tak Bermotor.	
				OT1.2.7.5 Tersedianya Mebel	OT1.2.7.5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.5 Pengadaan Mebel.	
				OT1.2.7.6 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	OT1.2.7.6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin	
				OT1.2.7.7 Tersedianya Aset Tetap Lainnya	OT1.2.7.7 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya.	
				OT1.2.7.8 Tersedianya Aset Tak Berwujud	OT1.2.7.8 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.8 Pengadaan Aset Tak Berwujud.	
				OT1.2.7.9 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.2.7.9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
				OT1.2.7.10 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.2.7.10 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
				OT1.2.7.11 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.2.7.11 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.1.2.7.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
				OT1.2.8 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	**OT1.2.8 Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KEG.1.2.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	
				OT1.2.8.1 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OT1.2.8.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SUBKEG.1.2.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	
				OT1.2.8.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OT1.2.8.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SUBKEG.1.2.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	
				OT1.2.8.3 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OT1.2.8.3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.2.8.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	
				OT1.2.8.4 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	OT1.2.8.4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.2.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT1.2.9 Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**OT1.2.9 Persentase dalam kondisi baik**	**KEG1.2.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	
				OT1.2.9.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OT1.2.9.1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SUBKEG.1.2.9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
				OT1.2.9.2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OT1.2.9.2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SUBKEG.1.2.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	
				OT1.2.9.3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	OT1.2.9.3 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	SUBKEG.1.2.9.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.	
				OT1.2.9.4 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	OT1.2.9.4 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	SUBKEG.1.2.9.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.	
				OT1.2.9.5 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	OT1.2.9.5 Jumlah Mebel yang Dipelihara	SUBKEG.1.2.9.5 Pemeliharaan Mebel.	
				OT1.2.9.6 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OT1.2.9.6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SUBKEG.1.2.9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	
				OT1.2.9.7 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	OT1.2.9.7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	SUBKEG.1.2.9.7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.	
				OT1.2.9.8 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	OT1.2.9.8 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	SUBKEG.1.2.9.8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.	
				OT1.2.9.9 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OT1.2.9.9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUBKEG.1.2.9.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	
				OT1.2.9.10 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.2.9.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUBKEG.1.2.9.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
				OT1.2.9.11 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.2.9.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUBKEG.1.2.9.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
				OT1.2.9.12 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	OT1.2.9.12 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	SUBKEG.1.2.9.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah (S-8) **3. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** **4. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** **5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal** **6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah** **7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)**	**T2. Meningkatkan investasi**				**T2 Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah**		
		S2.1 Meningkatnya Realisasi Investasi			**S2.1. Realisasi investasi PMDN/PMA (Juta Rupiah)** **S2.1. Jumlah Investor berskala nasional**		
			0C1.1.2 Meningkatnya Kemudahan berinvestasi		**0C1.1.2 Persentase penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal**	**PROG.2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	
				OT2.2.1 Tersedianya Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**OT2.2.1 Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**KEG.2.2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
				OT.2.2.1.1 Ditetapkannya Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	OT.2.2.1.1 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	SUBKEG.2.2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	
				OT.2.2.1.3 Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah	OT.2.2.1.3 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	SUBKEG.2.2.1.3 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				OT.2.2.1.4 Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	OT.2.2.1.4 Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	SUBKEG.2.2.1.4 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	
				OT.2.2.2 Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	**OT.2.2.2 Jumlah Peta Potensi Investasi Daerah**	**KEG.2.2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	
				OT.2.2.2.1 Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	OT.2.2.2.1 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	SUBKEG.2.2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	
				OT.2.2.2.3 Tersedianya Data Potensi Investasi Daerah Yang Termutakhirkan	OT.2.2.2.3 Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	SUBKEG.2.2.2.3 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional).	
				OT.2.2.2.4 Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	OT.2.2.2.4 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	SUBKEG.2.2.2.4 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	
				OT.2.3.3 Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	**OT.2.3.3 Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**	**KEG.2.3.3 Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur.**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **8. PP 5/2021 Mengatur lebih spesifik mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, serta mengubah kebijakan dari aturan sebelumnya (PP 24/2018)** **9. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021, Memberikan panduan dan tata cara pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS**				OT.2.3.3.1 Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	OT.2.3.3.1 Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	SUBKEG.2.3.3.1 Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan	
				OT.2.3.4 Terlaksananya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	**OT.2.3.4 Jumlah Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**	**KEG.2.3.4 Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota.**	
				OT.2.3.4.1 Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	OT.2.3.4.1 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	SUBKEG.2.3.4.1 Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota.	
				OT.2.3.5 Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	**OT.2.3.5 Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha Antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat Dengan Perusahaan PMA/PMDN Yang Berskala Nasional Besar**	**KEG.2.3.5 Kemitraan Usaha Nasional**	
				OT.2.3.5.1 Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	OT.2.3.5.1 Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	SUBKEG.2.3.5.1 Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar.	
				OT.2.3.6 Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	**OT.2.3.6 Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota**	**KEG2.3.6 Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.**	
				OT.2.3.6.1 Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	OT.2.3.6.1 Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	SUBKEG.2.3.6.1 Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	
				OT.2.4.3 Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	**OT.2.4.3 Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**	**KEG.2.4.3 Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT.2.4.3.1 Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	OT.2.4.3.1 Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	SUBKEG.2.4.3.1 Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam.	
				OT.2.4.4 Terlaksananya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	**OT.2.4.4 Jumlah Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**	**KEG.2.4.4 Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota.**	
				OT.2.4.4.1 Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	OT.2.4.4.1 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	SUBKEG.2.4.4.1 Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota.	
				OT.2.4.5 Terlaksananya Kemitraan Usaha Nasional	**OT.2.4.5 Jumlah Fasilitas Kemitraan Usaha Nasional**	**KEG.2.4.5 Kemitraan Usaha Nasional.**	
				OT.2.4.5.1 Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	OT.2.4.5.1 Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	SUBKEG.2.4.5.1 Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar.	
				OT.2.4.6 Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	**OT.2.4.6 Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota**	**KEG.2.4.6 Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.**	
				OT.2.4.6.1 Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	OT.2.4.6.1 Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	SUBKEG.2.4.6.1 Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	
			0C1.1.3 Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		**0C1.1.3 Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)**	**PROG.3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	
				OT.3.2.1 Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**OT.3.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**KEG.3.2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
				OT.3.2.1.1 Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	OT.3.2.1.1 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	SUBKEG.3.2.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. 03. 2,01. 0001	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT.3.2.1.2 Tersusunnya Dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	OT.3.2.1.2 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	SUBKEG.3.2.1.3 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota. 03. 2,01. 0003	
			0C1.1.4 Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		**0C1.1.5 Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP**	**PROG.4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	
				OT.4.2.1 Tersedinya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	**OT.4.2.1 Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota**	**KEG.4.2.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	
				OT.4.2.1.5 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	OT.4.2.1.5 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.4.2.1.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				OT.4.2.1.6 Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	OT.4.2.1.6 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	SUBKEG.4.2.1.6 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				OT.4.2.1.7 Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	OT.4.2.1.7 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	SUBKEG.4.2.1.7 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko.	
				OT.4.2.1.8 Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	OT.4.2.1.8 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	SUBKEG.4.2.1.8 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.	
			0C1.1.5 Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		**0C1.1.6 Persentase kepatuhan pelaku usaha/ penanam modal terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**	**PROG.5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	
				OT.5.2.1 Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	**OT.5.2.1 Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**KEG.5.2.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
				OT.5.2.1.4 Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku	OT.5.2.1.4 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	SUBKEG.5.2.1.4 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
				OT.5.2.1.5 Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	OT.5.2.1.5 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	SUBKEG.5.2.1.5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				OT.5.2.1.6 Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data,Profil dan Informasi Kegiatan Serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	OT.5.2.1.6 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	SUBKEG.5.2.1.6 Pengawasan Penanaman Modal	
			0C1.1.6 Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		**0C1.1.7 Persentase pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**PROG.6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	
				OT.6.2.1 Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota	**OT.6.2.1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan**	**KEG.6.2.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				OT.6.2.1.1 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	OT.6.2.1.1 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan	SUBKEG.6.2.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 06. 2,01. 0002	

4.2. Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan Beserta Kinerja, dan Pagu Indikatif

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Renstra adalah bagian dari Rencana Strategis (Renstra) yang merinci kemampuan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan selama periode 5 tahun. Kerangka ini menjelaskan sumber pendanaan, alokasi dana, dan proyeksi pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP, serta harus selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan dimaksut sebagaimana tersaji pada Tabel 4.2 di bawah:

Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROG.1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA *Outcome: Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah*	**OC1.1.1 Persentase capaian realisasi anggaran Dinas PMPTSP (%)**	**3,521,560,000**	**93,50**	**3,944,482,000**	**95,50**	**871,339,055**	**96,50**	**3,545,380,300**	**97,50**	**3,932,406,800**	**98,50**	**4,135,828,100**	
	OC1.1.1 Persentase capaian kinerja Dinas PMPTSP (%)		**88,50**		**90,50**		**91,50**		**92,50**		**93,50**		
KEG.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**OT1.1.1 Persentase Dokumen /Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu**	21,000,000	100%	30,000,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	
SUBKEG.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OT1.1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	1,500,000	2 Dokumen	1,500,000	2 Dokumen	1,500,000	2 Dokumen	1,500,000	
SUBKEG.1.1.2 Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	OT1.1.1.2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,500,000	1 Dokumen	4,375,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	
SUBKEG.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	OT1.1.1.3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,500,000	1 Dokumen	4,375,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	
SUBKEG.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKP	OT1.1.1.4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,500,000	1 Dokumen	4,375,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	
SUBKEG.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	OT1.1.1.5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3,500,000	1 Dokumen	4,375,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	
SUBKEG.1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OT1.1.1.6 Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	1,500,000	
SUBKEG.1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT1.1.1.7 Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	
SUBKEG.1.1.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	OT1.1.1.8 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG.1.1.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	OT1.1.1.9 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daera	-	Data	-	Data	-	Data	-	Data	-	Data	-	
SUBKEG.1.1.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	OT1.1.1.10 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yang Diampu dalam Rangka	-	Berita Acara	-	Berita Acara	-	Berita Acara	-	Berita Acara	-	Berita Acara	-	

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
SUBKEG.1.1.11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	OT1.1.1.11 Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG.1.1.12 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	OT1.1.1.12 Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-	Substansi	-	Substansi	-	Substansi	-	Substansi	-	Substansi	-	
SUBKEG.1.1.13 Sinkronisasi danHarmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	OT1.1.1.13 Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	Berita Acara	-	Berita Acara	-	Berita Acara	-	Berita Acara	-	Berita Acara	-	
KEG.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	**OT1.1.2 Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolan Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu**	**2,623,150,000**	**100%**	**2,597,647,500**	**100%**	**4,000,000**	**100%**	**2,644,480,833**	**100%**	**2,818,250,000**	**100%**	**2,696,061,600**	
SUBKEG. 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OT1.1.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,613,150,000	26 Orang	2,585,897,500	26 Orang	2.699.010.595	26 Orang	2,640,480,833	26 Orang	2,814,250,000	26 Orang	2,692,061,600	
SUBKEG. 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OT1.1.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		
SUBKEG. 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	OT1.1.2.3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG. 1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	OT1.1.2.4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG. 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OT1.1.2.5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	1 Laporan	3,750,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	
SUBKEG. 1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	OT1.1.2.6 Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG. 1.2.7 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	OT1.1.2.7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,000,000	2 Laporan	3,000,000	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	
SUBKEG. 1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	OT1.1.2.8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,000,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	2,000,000	12 Dokumen	2,000,000	12 Dokumen	2,000,000	12 Dokumen	2,000,000	
KEG.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**OT1.1.3 Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu**	**10,000,000**	**100%**	**12,500,000**	**100%**	**6,000,000**	**100%**	**5,000,000**	**100%**	**4,500,000**	**100%**	**20,000,000**	
SUBKEG. 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	OT1.1.3.1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3,000,000	2 Dokumen	3,750,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	1,500,000	2 Dokumen	1,500,000	2 Dokumen	17,000,000	

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SUBKEG. 1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	OT1.1.3.2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG.1.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	OT1.1.3.3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
SUBKEG. 1.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	OT1.1.3.4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
SUBKEG. 1.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OT1.1.3.5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,000,000	4 Laporan	3,750,000	4 Laporan	2,000,000	4 Laporan	2,000,000	4 Laporan	1,500,000	4 Laporan	1,500,000	
SUBKEG. 1.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	OT1.1.3.6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,000,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	2,000,000	2 Laporan	1,500,000	2 Laporan	1,500,000	2 Laporan	1,500,000	
SUBKEG. 1.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	OT1.1.3.7 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
KEG.1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**OT1.1.4 Persentase Ketersediaan Dokumen/ Laporan Pendapatan Daerah Yang diselesaikan**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	
SUBKEG.1.4.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	OT1.1.4.1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG.1.4.2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, sertaPenyusunanKebijakan Retribusi Daerah	OT1.1.4.2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerahdan Kebijakan Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG.1.4.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	OT1.1.4.3 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
SUBKEG.1.4.4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	OT1.1.4.4 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG.1.4.5 Pengolahan Data Retribusi Daerah	OT1.1.4.5 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
SUBKEG.1.4.6 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	OT1.1.4.6 Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG.1.4.7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	OT1.1.4.7 umlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
KEG.1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**OT1.1.5 Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	
SUBKEG.1.5.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	OT1.1.5.1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG.1.5.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	OT1.1.5.2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	
SUBKEG.1.5.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	OT1.1.5.3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG.1.5.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OT1.1.5.4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SUBKEG.1.5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OT1.1.5.5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG.1.5.6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	OT1.1.5.6 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	
SUBKEG.1.5.7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	OT1.1.5.7 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
SUBKEG.1.5.8 Pemindahan Tugas ASN	OT1.1.5.8 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	
SUBKEG.1.5.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OT1.1.5.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	
SUBKEG.1.5.10 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	OT1.1.5.10 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	
SUBKEG.1.5.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	OT1.1.5.11 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	
KEG. 1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**OT1.1.6 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**	**247,073,100**	**100%**	**358,841,375**	**100%**	**20,900,000**	**100%**	**25,727,867**	**100%**	**26,000,000**	**100%**	**116,271,397**	
SUBKEG. 1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OT1.1.6.1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	
SUBKEG. 1.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OT1.1.6.2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	
SUBKEG. 1.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OT1.1.6.3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	
SUBKEG. 1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OT1.1.6.4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	
SUBKEG. 1.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OT1.1.6.5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8,285,100	3 Paket	50,356,375	3 Paket	2,000,000	3 Paket	2,500,000	3 Paket	2,000,000	3 Paket	2,000,000	
SUBKEG. 1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OT1.1.6.6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,020,000	1 Dokumen	15,025,000	1 Dokumen	3,900,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	2,550,000	
SUBKEG. 1.6.7 Penyediaan Bahan/Material	OT1.1.6.7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		
SUBKEG. 1.6.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	OT1.1.6.8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		
SUBKEG. 1.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OT1.1.6.9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234,768,000	174 Laporan	293,460,000	14 Laporan	15,000,000	20 Laporan	20,227,867	30 Laporan	21,000,000	113 Laporan	111,721,397	
SUBKEG. 1.6.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OT1.1.6.10 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
SUBKEG. 1.6.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	OT1.1.6.11 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
KEG.1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**OT1.1.7 Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**131,360,000**	**100%**	**175,000,000**	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**21,000,000**	**100%**	**25,000,000**	**100%**	**22,250,000**	

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SUBKEG. 1.7.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OT1.1.7.1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.7.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OT1.1.7.2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.7.3 Pengadaan Alat Besar	OT1.1.7.3 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.7.4 PengadaanAlat AngkutanDarat Tak Bermotor	OT1.1.7.4 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.7.5 Pengadaan Mebel	OT1.1.7.5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.7.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OT1.1.7.6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	131,360,000	11 Unit	175,000,000	2 Unit	20,000,000	5 Unit	21,000,000	4 Unit	25,000,000	4 Unit	22,250,000	
SUBKEG. 1.7.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	OT1.1.7.7 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.7.8 Pengadaan Aset Tak Berwujud	OT1.1.7.8 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.7.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.1.7.9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.7.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.1.7.10 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.7.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.1.7.11 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
KEG. 1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**OT1.1.8 Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**406,050,900**	**100%**	**507,563,685**	**100%**	**141,677,705**	**100%**	**147,500,000**	**100%**	**305,724,400**	**100%**	**313,735,603**	
SUBKEG.1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OT1.1.8.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
SUBKEG.1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OT1.1.8.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	141,748,000	3 Laporan	177,185,000	3 Laporan	126,000,000	3 Laporan	130,000,000	3 Laporan	188,000,000	3 Laporan	175,000,000	
SUBKEG.1.8.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OT1.1.8.3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Laporan		Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
SUBKEG.1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OT1.1.8.4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	264,302,900	3 Laporan	330,378,685	3 Laporan	15,677,705	3 Laporan	17,500,000	3 Laporan	117,724,400	3 Laporan	138,735,603	
KEG.1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**OT. 1.9 Persentase Ketersediaan Pemenuhan Barang Milik yang terpelihara**	**82,926,000**	**100%**	**262,929,440**	**100%**	**15,500,000**	**100%**	**27,500,000**	**100%**	**97,500,000**	**100%**	**295,000,000**	
SUBKEG. 1.9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OT1.1.9.1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	43,016,000	1 Unit	73,041,940	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	75,000,000	
SUBKEG. 1.9.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,	OT1.1.9.2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	6,640,000	15 Unit	98,300,000	5 Unit	2,500,000	5 Unit	2,500,000	5 Unit	22,500,000	18 Unit	150,000,000	

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DipeliharadandibayarkanPajakdan Perizinannya												
SUBKEG. 1.9.3. Penyediaan Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	OT1.1.9.3 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	Unit	0	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.9.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	OT1.1.9.4 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.9.5. Pemeliharaan Mebel	OT1.1.9.5 Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Unit		Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.9.6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OT1.1.9.6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33,270,000	32 Unit	91,587,500	10 Unit	3,000,000	20 Unit	15,000,000	20 Unit	20,000,000	27 Unit	70,000,000	
SUBKEG. 1.9.7. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	OT1.1.9.7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.9.8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	OT1.1.9.8 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.9.9. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OT1.1.9.9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.9.10. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.1.9.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.9.11. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.1.9.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
SUBKEG. 1.9.12. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	OT1.1.9.12 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		789,482,069		676,040,000		649,761,350		660,671,600		641,932,400		659,009,500	
T2 Meningkatkan investasi	**T2.1 Persentase Peningkatan Investasi**												
S2 Meningkatnya realisasi investasi	**S2.1 Nilai Realisasi investasi PMDN/PMA**												
PROG.2 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**OC2.1.1 Persentase penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal**	**10,000,000**	**1**	**50,000,000**	**1**	**58,862,250**	**1**	**62,745,700**	**1**	**63,448,800**	**1**	**68,422,600**	
KEG. 2.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota *Outcome: Meningkatnya kemudahan berinvestasi*	OT2.1.1 Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	2 Pelaku Usaha	50,000,000	2 Pelaku Usaha	58,862,250	2 Pelaku Usaha	62,745,700	2 Pelaku Usaha	63,448,800	2 Pelaku Usaha	68,422,600	

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SUBKEG. 2.1.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	OT2.1.1.1 Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10,000,000	1 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	58,862,250	3 Dokumen	62,745,700	4 Dokumen	63,448,800	4 Dokumen	68,422,600	
SUBKEG. 2.1.2. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	OT2.1.1.2 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah	-	Dokumen	-	2 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG. 2.1.3 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	OT2.1.1.3 Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
KEG. 2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**OT2.1.2 Jumlah Peta Potensi Investasi Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBKEG. 2.2.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	OT2.1.2.1 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
SUBKEG. 2.2.2. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	OT2.1.2.2 Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-	Daerah	-	1 Daerah	-	Daerah	-	Daerah	-	Daerah	-	
SUBKEG. 2.2.3. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	OT2.1.2.3 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
KEG. 2.3. Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	**OT2.1.3 Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**	-		-		-		-		-		-	
SUBKEG. 2.3.1 Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	OT2.1.3.1 Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	
KEG. 2.4 Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	**OT2.1.4 Jumlah Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBKEG.2.4.1 Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/ Kota	OT2.1.4.1 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	
KEG. 2.5. Kemitraan Usaha Nasional	**OT2.1.5 Jumlah Fasilitas Kemitraan Usaha Antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat Dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Nasional Besar**	-		-		-		-		-		-	
SUBKEG.2.5.1 Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	OT2.1.5.1 Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-	UMKM		UMKM		UMKM		UMKM		UMKM		
KEG. 2.6. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam	**OT2.1.6 Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	**Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota**												
SUBKEG.2.6.1 Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	OT2.1.6.1 Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
KEG. 2.7. Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	**OT2.1.7 Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBKEG.2.7.1 Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	OT2.1.7.1 Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	
KEG. 2.8. Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	**OT2.1.8 Jumlah Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBKEG.2.8.1 Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	OT2.1.8.1 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	
KEG. 2.9. Kemitraan Usaha Nasional	**OT2.1.9 Jumlah Fasilitas Kemitraan Usaha Antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat Dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Nasional Besar**	-	UMKM	-	UMKM	-	UMKM	-	UMKM	-	UMKM	-	
SUBKEG.2.9.1 Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	OT2.1.9.1 Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-	UMKM	-	UMKM	-	UMKM	-	UMKM	-	UMKM	-	
KEG. 2.10. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	**OT2.1.10 Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
SUBKEG.2.10.1 Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota	OT2.1.10.1 Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
PROG.3 PROMOSI PENANAMAN MODAL ***Outcome: Meningkatnya jumlah investor***	**OC2.3. Jumlah investor (PMDN/PMA)** **OC2.3. Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)**	40,000,000	381	125,000,000	403	215,627,500	425	213,205,000	447	201,638,500	447	204,766,800	

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEG. 3.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**OT2.2.1. Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	40,000,000	2 kali	125,000,000	2 kali	215,627,500	2 kali	213,205,000	2 kali	201,638,500	2 kali	204,766,800	
SUBKEG.3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	OT2.2.1.1 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	40,000,000	30 Dokumen	125,000,000	35 Dokumen	215,627,500	40 Dokumen	213,205,000	45 Dokumen	201,638,500	45 Dokumen	204,766,800	
SUBKEG.3.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	OT2.2.1.2 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
PROG. 4 PELAYANAN PENANAMAN MODAL ***Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non*** *perizinan yang cepat, tepat, dan sesuai standar*	**OC2.4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP**	**52,279,069**	**100%**	**125,000,000**	**100%**	**59,065,300**	**100%**	**64,253,800**	**100%**	**66,304,500**	**100%**	**72,992,200**	
KEG. 4.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**OT2.4.1. Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota**	**52,279,069**	**3840 Pelaku Usaha**	**125,000,000**	**4,916**	**59,065,300**	**6,290**	**64,253,800**	**8,054**	**66,304,500**	**8,054**	**72,992,200**	
SUBKEG. 4.1.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	OT2.2.1.1 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	7,000,000	2 Dokumen	7,050,700	2 Dokumen	8,050,700	
SUBKEG. 4.1.2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	OT2.3.1.2 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	32,538,569	1920 Pelaku Usaha	65,000,000	2458 Pelaku Usaha	35,000,000	3146 Pelaku Usaha	38,000,000	4027 Pelaku Usaha	32,000,000	4027 Pelaku Usaha	35,000,000	
SUBKEG. 4.1.3. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	OT2.3.1.3 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	17,940,500	1920 Pelaku Usaha	25,000,000	2458 Pelaku Usaha	12,000,000	3146 Pelaku Usaha	12,000,000	4027 Pelaku Usaha	20,000,000	4027 Pelaku Usaha	20,000,000	
SUBKEG. 4.1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	OT2.3.1.4 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1,800,000	8 Kegiatan Usaha	15,000,000	10 Kegiatan Usaha	7,065,300	13 Kegiatan Usaha	7,253,800	16 Kegiatan Usaha	7,253,800	16 Kegiatan Usaha	9,941,500	
PROG.5 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL *Outcome: Meningkatnya kepatuhan penyampaian LKPM oleh pelaku usaha*	**OC2.4. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha**	**668,117,000**	**38,10%**	**351,040,000**	**49,45%**	**303,538,800**	**60,81%**	**307,715,600**	**72,17%**	**298,263,900**	**72,17%**	**298,263,900**	

BIDANG RUMUSAN// PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEG. 5.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**OT2.4.1. Jumlah Dokumen penyelesaian permasalahan dan bimbingan teknis atau pelaporan LKPM**	**668,117,000**	**-**	**351,040,000**	**-**	**303,538,800**	**-**	**307,715,600**	**-**	**298,263,900**	**-**	**298,263,900**	
SUBKEG.5.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	OT2.4.1.1 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	94,217,000	5 Kegiatan Usaha	24,217,000	5 Kegiatan Usaha	24,217,000	5 Kegiatan Usaha	22,217,000	5 Kegiatan Usaha	20,217,000	5 Kegiatan Usaha	20,217,000	
SUBKEG.5.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	OT2.4.1.2 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	385,466,000	35 Pelaku Usaha	145,543,000	40 Pelaku Usaha	105,543,000	40 Pelaku Usaha	108,719,800	45 Pelaku Usaha	157,823,030	45 Pelaku Usaha	157,823,030	
SUBKEG.5.1.3 Pengawasan Penanaman Modal	OT2.4.1.3 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	188,434,000	15 Kegiatan Usaha	181,280,000	15 Kegiatan Usaha	173,778,800	20 Kegiatan Usaha	176,778,800	20 Kegiatan Usaha	120,223,870	20 Kegiatan Usaha	120,223,870	
PROG.6 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL *Outcome: Meningkatnya pemanfaatan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	**OC2.5. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**19,086,000**	**100%**	**25,000,000**	**100%**	**12,667,500**	**100%**	**12,751,500**	**100%**	**12,276,700**	**100%**	**14,564,000**	
KEG. 6.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**OT2.5.1 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**19,086,000**	**4 Dokumen**	**25,000,000**	**4 Dokumen**	**12,667,500**	**4 Dokumen**	**12,751,500**	**4 Dokumen**	**12,276,700**	**4 Dokumen**	**14,564,000**	
SUBKEG. 6.1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	OT2.5.1.1 Jumlah Data dan Informasi PerizinanBerbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	19,086,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	12,667,500	4 Dokumen	12,751,500	4 Dokumen	12,276,700	4 Dokumen	14,564,000	

4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan prioritas secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, baik dalam bentuk output maupun outcome yang terukur. Subkegiatan ini disusun berdasarkan tujuan strategis perangkat daerah dan diarahkan menjawab isu-isu pembangunan yang mendesak, penting, serta memiliki dampak bagi masyarakat.

Sub kegiatan prioritas untuk mendukung program prioritas Renstra DPMPTSP mencakup penyelenggaraan pelayanan perizinan, pengelolaan penanaman modal, Promosi, penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan SDM, dan pengembangan sistem informasi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menarik investasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan pemerintah daerah, dan mencapai target kinerja yang terukur.

Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah di tunjukan Pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.
Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	**Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM**	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	
			Kegiatan: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			SubKegiatan: Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pemenuhan dokumentasi Investasi berkelanjutan (Kepastian Hukum Investasi)
			Kegiatan: Kemitraan Usaha Nasional	
			SubKegiatan: Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Fasilitasi antara pengusaha besar dengan masyarakat/ UMKM (Kemitraan)
		Meningkatnya jumlah investor	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Pelaporan LKPM untuk mengukur realisasi Investasi
			Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Pengawasan Penanaman Modal	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, dan sesuai standar	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	MPP dan Perizinan Mobile
			Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dpmptsp Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMPTSP

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana (Renstra) DPMPTSP diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). sebagai ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategis organisasi, menyediakan data penting untuk manajemen kinerja, serta mendukung perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTSP.

Tujuan Penetapan IKU untuk DPMPTSP.

1. Mengukur Keberhasilan: Untuk mengukur seberapa berhasil DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.
2. Mendukung Manajemen Kinerja: Untuk memperoleh informasi penting tentang kinerja yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
3. Meningkatkan Akuntabilitas: Untuk memastikan peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penetapan target yang jelas.

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud Tersaji pada Tabel 4.4 :

Tabel 4.4 Proyeksi Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	INDIKATOR	Satuan	Baseline	TARGET						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,55	62,54	64,91	68,41	70,32	72,97	74,81	IUP
	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	Angka	61,68 (Cukup Baik)	63,59 (Cukup Baik)	63,59 (Cukup Baik)	64,50 (Cukup Baik)	65,52 (Cukup Baik)	66,39 (Cukup Baik)	67,01 (Cukup Baik)	
	Indeks Pelayanan Publik	%	86,00	88,00	88,89	89,64	90,39	91,14	91,89	
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	2,00 %	9,09%	10,94%	11,30%	12,21%	13,04%	14,41%	IUP
	Realisasi investasi PMDN/PMA (Juta Rupiah)	Angka	67.000	36.800	38.100	40.300	42.500	44.700	46.900	

Cat.

Berlaku pada Kondisi *ceteris paribus*, dimana asumsi dalam ilmu ekonomi dan ilmiah lain yang berarti "semua hal lain dianggap sama" atau konstan, sehingga analisis dapat difokuskan pada hubungan sebab-akibat antara dua variabel tanpa dipengaruhi oleh faktor lain yang berubah.

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan alat kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, serta visi dan misi daerah. IKK ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan daerah dan menjadi dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang selanjutnya dievaluasi oleh kementerian terkait untuk perbaikan berkelanjutan.

Fungsi dan Tujuan IKK

Mengukur Keberhasilan: IKK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Dasar Penyusunan LPPD: IKK menjadi acuan utama dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), laporan resmi pemerintah daerah mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Dasar Evaluasi: Hasil pengukuran IKK dalam LPPD menjadi dasar bagi kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Sinkronisasi dan Peningkatan Kualitas: Melalui evaluasi IKK, pemerintah daerah dapat menyinkronkan target dengan realisasi kinerja, serta meningkatkan kualitas LPPD dan penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan.

Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah DPMPTSP Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dimaksud Tersaji pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Proyeksi Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2024)	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD	DEFINISI/ METODE PERHITUNGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1	Persentase penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Investor	0	1	1	1	1	1	1	6	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dibagi dengan total seluruh penanam modal
2	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Orang/ Lembaga	359	368	381	403	425	447	469	469	Jelas
3	Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	28.461	58.000	53.791	60.622	68.321	76.998	86.777	86.777	Jelas
4	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Perbandingan antara pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai SOP dengan total seluruh perizinan dan non perizinan yang diajukan
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha/ penanam modal terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	26,74	32,42	38,10	49,45	60,81	72,17	83,53	83,53	Perbandingan antara jumlah pelaku usaha/ penanam modal yang telah menyampaikan LKPM dengan jumlah seluruh pelaku usaha/ penanam modal yang terdaftar
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sistem OSS untuk peri zinan/Total pelaku usaha yang mengajukan perizinan X100% =

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sebagai instrument/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif serta mencerminkan komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan sumber daya, memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP tahun 2025-2029 dijabarkan kedalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2026 - 2029 dengan tujuan menjaga konsistensi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan daerah. Guna memastikan pencapaian Tujuan, sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, dibutuhkan penyesuaian terhadap peta proses bisnis, standar operasional prosedur serta metode pengukuran dan evaluasi kinerja, agar kolaborasi dan koordinasi antar unit kerja dapat optimal.

Pengawasan kinerja perangkat daerah salah satunya dengan penyediaan Lapran Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) setiap bulan berjalan. Pelaporan kinerja perangkat daerah pada akhir tahun wajib dilakukan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kepala Dinas selaku pelaku Penanggung Jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Revisi Renstra Dinas PMPTSP 2025-2029 bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut. Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan reviu

Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran perbaikan.

Benteng, 25 September 2025

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN

PEMETAAN VISI, MISI, PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI		ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU & SEJAHTERA	MAJU	3	Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah								
				Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur							

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI		ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah	**Program Pengembangan Usaha Korporasi.**	**Peningkatan akses permodalan**				
								4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
									Menyusun Peta Investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
									Menyusun SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi) Investasi	Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalamPemberian Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenanaman Modal
									Melakukan update data pada aplikasi PIR (Peta Investasi Regional)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
								5. Program Promosi Penanaman Modal	Melaksanakan Promosi Penanaman Modal Secara Daring dan Luring	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal
								6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian permasalahan dan Bimbingan teknis atau pelaporan LKPM
								7. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Meningkatkan kualitas layanan di kantor	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibiang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara online dan ofline (layanan langsung di kantor, layanan di gerai kecamatan/desa dan layanan mobile)
									pelayanan perizinan dan promosi investasi pada program gemerlap, pusat layanan terpadu nelayan dan usaha perikanan, Pengembangan Destinasi Pariwisata (Destinasi Wisata)		
									2. Melakukan pelayanan secara mobile		
									pelayanan perizinan dan promosi investasi pada program gemerlap, pusat layanan terpadu nelayan dan usaha perikanan, Pengembangan Destinasi Pariwisata (Destinasi Wisata)		
									3. Membentuk tim operator kecamatan		

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Satuan	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) RencanaUmum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota		2		2	Rp. 250.000.000								
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1		1	Rp. 150.000.000								
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		1		1	Rp. 50.000.000	1	Rp. 50.000.000	1	Rp. 50.000.000	1	Rp. 50.000.000	1	Rp. 50.000.000
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional);	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		1		1	RP. 75.000.000	1	RP. 75.000.000	1	RP. 75.000.000	1	RP. 75.000.000	1	RP. 75.000.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota		1		1	Rp. 200.000.000	1	Rp. 200.000.000	1	Rp. 200.000.000	1	Rp. 200.000.000	1	Rp. 200.000.000
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		1		1	Rp. 100.000.000								
Penyelesian hambatan dan permasalahan perizinan berusaha	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		10		10	Rp. 100.000.000	10	Rp. 100.000.000	10	Rp. 100.000.000	10	Rp. 100.000.000	10	Rp. 100.000.000
1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		1500 pelaku usaha		1700 pelaku usaha	450000000	1900 pelaku usaha	150000000	2000 pelaku usaha	175000000	2100 pelaku usaha	175000000	2200 pelaku usaha	175000000
2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		300 pelaku usaha		300 pelaku usaha	50000000	300 pelaku usaha	50000000	300 pelaku usaha	50000000	300 pelaku usaha	50000000	300 pelaku usaha	50000000

Benteng, 25 September 2025

Kepala Dinas PMPTSP,

Dr. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 149.n/III/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Meliputi Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;

c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap penetapan visi, misi dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
f. merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
g. merumuskan strategis dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan susunan target kinerja;
h. mengindentifikasi dan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya(target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strstegi dan arah kebijakan; dan
k. menyusun dokumen rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada pos Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 3 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 149.n/III/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025-2029

A. Ketua : Kepala Dinas PMPTSP
B. Sekretaris : Sekretaris Dinas PMPTSP
C. Anggota :
1. Kasubag Umum Dinas PMPTSP
2. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas PMPTSP
3. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas PMPTSP
4. Andi Nurhawati, S.H (Staf Dinas PMPTSP)
5. Nurlinda, S.T (Staf Dinas PMPTSP)
6. Nur Fajar Taufi, S.Kom. M.T.i (Staf Dinas PMPTSP)
7. Irmawati, S.ST (Staf Dinas PMPTSP)
8. Abd. Nasir, A.Md.Kom (Staf Dinas PMPTSP)
9. Hartiwi Damayanti, S.Pd (Staf Dinas PMPTSP)
10. Marhaeni (Staf Dinas PMPTSP)
11. Andi Hartati Amral, S.Sos (Staf Dinas PMPTSP)
12. Sri Suryaningsi Umar, S.Hut (Staf Dinas PMPTSP)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI